

Tebet Eco Park sebagai Ruang Sosial Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Dhea Kusumawati

Departemen Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dheakusumawati192@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana klaim inklusivitas Tebet Eco Park pascarevitalisasi benar-benar terwujud dalam praktik, serta bagaimana penyandang disabilitas mengalami dan memaknai taman kota sebagai ruang sosial. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi literatur terhadap lima penyandang disabilitas dan informan triangulasi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, pengelola taman, serta pengunjung non-disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi taman lebih banyak menekankan aspek ekologi dan estetika, sementara dimensi inklusivitas masih menyisakan kesenjangan. Hambatan yang ditemukan antara lain guiding block yang tidak merata, minimnya informasi taktil, serta keterbatasan fasilitas aksesibel. Meski demikian, penyandang disabilitas tetap memanfaatkan taman sebagai ruang reproduksi sosial melalui aktivitas rekreasi dan interaksi, dengan melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ruang. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa taman kota merupakan ruang sosial yang sedang berada dalam proses menuju inklusivitas. Analisis dengan teori produksi ruang Lefebvre memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara representasi ruang yang diklaim inklusif dengan realitas pengalaman pengguna disabilitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman tentang produksi ruang inklusif, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pengelola taman untuk memperkuat aksesibilitas dan kesetaraan dalam ruang publik perkotaan.

Kata Kunci: Inklusivitas, Penyandang Disabilitas, Produksi Ruang, Ruang Sosial

ABSTRACT

This study examines the extent to which the claim of Tebet Eco Park as an inclusive urban park, following its revitalization, is realized in practice, and how persons with disabilities experience and interpret the park as a social space. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, direct observation, documentation, and literature review involving five persons with disabilities and triangulation informants from the Jakarta City Parks and Forestry Agency, park management, and non-disabled visitors. The findings reveal that while the revitalization primarily emphasized ecological and aesthetic improvements, the inclusivity dimension remains limited. Barriers identified include uneven guiding blocks, insufficient tactile information, and restricted accessibility of facilities. Despite these challenges, persons with disabilities continue to use the park as a site of social reproduction through recreational activities, adapting to spatial constraints in various ways. Conceptually, the study positions urban parks as social spaces in the process of becoming inclusive, highlighting the gap between the official representation of inclusive space and the lived experiences of users with disabilities. These insights contribute to the theoretical discourse on Lefebvre's production of space and provide practical recommendations for policymakers and urban planners to strengthen accessibility and equity in public space design.

Keywords: Inclusivity, Persons with Disabilities, Space Production, Social Space

PENDAHULUAN

Kota merupakan pusat dari berbagai aktivitas anggota masyarakat yang mencerminkan perkembangan peradaban dan tingkat kompleksitas masyarakat saat ini. Dalam perkembangannya, kota menghadapi berbagai persoalan sebagai akibat dari tingginya intensitas aktivitas penduduknya dan pembangunan yang tengah berjalan. Semakin meningkatnya kegiatan kota, maka akibat yang ditimbulkan pun tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satu akibatnya adalah lahan hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin berkurang dan tidak diprioritaskan.

RTH merupakan bagian dari suatu wilayah perkotaan yang diisi dengan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi yang berguna untuk mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, serta arsitektual yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya (Jamaludin, 2015). Taman kota merupakan salah satu contoh dari RTH. Menurunnya kuantitas dan kualitas lahan hijau di perkotaan memberikan dampak lain bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah penurunan produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang sosial yang tersedia untuk berinteraksi.

Dalam upaya menunjukkan komitmen guna menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih hijau dan berkelanjutan, dilakukanlah berbagai program yang diimplementasikan untuk mengurangi masalah lingkungan tersebut. Pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta mengambil

langkah besar untuk menghidupkan kembali fungsi taman di Jakarta yaitu melakukan revitalisasi taman kota. Anies Baswedan dalam liputan media menuturkan, dasar dari program revitalisasi taman kota ini tidak lain karena masyarakat. Menurutnya sebuah kota setidaknya harus memiliki sebuah taman (*Park*), sebab selama ini taman-taman yang ada di kota Jakarta hanya dibangun sebagai taman (*Garden*). Baginya, *garden* hanya menghadirkan ruang hijau pasif, sementara *park* semestinya berfungsi sebagai ruang hidup yang memberikan ruang gerak bagi masyarakat. Kedua, sebuah taman (*Park*) harus bisa memfasilitasi empat kelompok paling dasar, yaitu penyandang disabilitas, lansia, perempuan (terutama ibu hamil), dan anak-anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai angka 22,97 juta jiwa, atau sekitar 8,5% dari total populasi (Website BPS, 2025). Berangkat dari jumlah ini, penyandang disabilitas menjadi salah satu *stakeholder* yang utama dalam program pembangunan dan revitalisasi taman yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Penyandang Disabilitas merujuk kepada individu yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu panjang. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh kelompok penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dan membaaur dengan masyarakat sekaligus mengatasi kesulitan dan keterbatasan fisik yang ada. Salah satunya

melalui Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Gerakan ini bertujuan untuk mendorong penyediaan fasilitas aksesibilitas di ruang-ruang publik, seperti infrastruktur bangunan, transportasi umum, jalur pejalan kaki dan layanan ramah disabilitas, demi mewujudkan kesetaraan hak di lingkungan perkotaan.

Taman Honda di kawasan Tebet merupakan salah satu taman yang menjadi sasaran program revitalisasi karena sebelumnya berada dalam kondisi kurang terawat. Area taman didominasi pepohonan yang tumbuh tanpa penataan, sehingga menciptakan kesan tidak menarik dan jarang dimanfaatkan warga untuk rekreasi maupun bersantai. Setelah melalui revitalisasi menyeluruh, taman ini kemudian berubah nama menjadi Tebet Eco Park dan diresmikan sebagai ruang publik perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklasifikasikannya sebagai ruang publik terbuka yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa biaya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang menyebut Tebet Eco Park sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan setara bagi semua warga.

Tebet Eco Park mengusung tiga konsep utama, yaitu fungsi ekologi, fungsi sosial, serta fungsi edukasi dan rekreasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Tebet Eco Park diproyeksikan tidak hanya sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai ruang publik yang memuat fungsi sosial. Namun demikian, bagaimana fungsi sosial tersebut terwujud secara inklusif

dalam praktik pemanfaatannya masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fasilitas yang telah disediakan benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas, serta apakah terdapat faktor lain yang menghambat partisipasi mereka dalam menggunakan taman sebagai ruang sosial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah fasilitas yang disediakan oleh taman cukup memadai, mengidentifikasi tantangan dalam menggunakannya, serta menganalisis taman sebagai ruang sosial yang inklusif bagi pengunjung penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami latar belakang dan pertimbangan yang mendasari pembuatan fasilitas ramah disabilitas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode studi kasus dengan kasus yang dibahas berkaitan dengan pengalaman penyandang disabilitas yang saat ini telah berperan sebagai *stakeholder* dalam pembangunan. Dalam metode ini, sebuah kasus dikaji dalam konteks kehidupan nyata dengan menitikberatkan pada suatu permasalahan atau isu tertentu. Selanjutnya, berbagai bentuk analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan kasus tersebut secara rinci.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini

yaitu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada perannya yang termasuk sebagai salah satu target dalam program revitalisasi taman kota. Taman ini telah meraih berbagai penghargaan, salah satunya Seoul Design Award 2024. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengakuan atas kualitas desain dan fungsinya.

Informan utama dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang berkunjung ke Tebet Eco Park. Sementara itu, Informan triangulasi dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Pengelola Taman Tebet Eco Park, dan pengunjung non disabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung untuk memahami kondisi di lapangan, serta analisis dokumen sebagai data pendukung.

KERANGKA KONSEPTUAL

a. Taman kota sebagai ruang sosial perkotaan

Taman kota memiliki fungsi sosial, ekologi, estetika, dan ekonomi (Umar, dkk. 2021). Sebagai ruang sosial, taman menjadi tempat masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan melakukan berbagai aktivitas, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi sektor informal seperti pedagang kaki lima. Dalam konsep ruang sosial, ruang tidak bersifat netral karena dibentuk oleh relasi sosial dan dapat merepresentasikan struktur kekuasaan

serta ketimpangan yang ada di masyarakat (Madanipour, 2003). Pemaknaan ruang sebagai representasi dari struktur sosial mengindikasikan bahwa ruang berfungsi sebagai salah satu arena dalam sistem kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun taman kota dirancang untuk mendorong interaksi sosial, akses terhadapnya tidak selalu merata dan sering kali dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial, etnis, maupun status ekonomi.

Ruang sosial juga dipenuhi berbagai makna dan kepentingan yang saling tumpang tindih, sehingga penataan ruang yang tampak netral dapat menyembunyikan kecenderungan eksklusif. Pemerataan akses terhadap ruang harus dipahami sebagai bagian dari perjuangan untuk keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan taman kota berfungsi sebagai ruang sosial yang inklusif. Melalui kebijakan penataan ruang dan penyediaan fasilitas yang memperhatikan keberagaman pengguna, termasuk kelompok disabilitas, negara dapat mendorong terciptanya ruang yang lebih adil. Tanpa upaya tersebut, taman berisiko hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat dan memperkuat ketimpangan sosial yang telah ada.

b. Disabilitas dalam perspektif sosial

Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, atau mental dalam

jangka waktu panjang. Namun, disabilitas tidak hanya dipahami sebagai kondisi individual, melainkan juga sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Cara masyarakat merespons perbedaan kemampuan, termasuk melalui kebijakan dan desain ruang, dapat menciptakan hambatan yang membuat penyandang disabilitas sulit mengakses ruang sosial seperti taman kota. Maka dari itu, keberadaan fasilitas fisik saja tidak selalu menjamin terciptanya aksesibilitas jika lingkungan sosial masih memproduksi praktik yang diskriminatif.

Dalam memahami disabilitas, terdapat beberapa pendekatan seperti model biomedis, model sosial, model hak asasi manusia, dan model psikoemosional (Brown et. al, 2023). Model biomedis memandang disabilitas sebagai akibat gangguan fungsi tubuh dan berfokus pada intervensi medis, sedangkan model sosial melihat disabilitas sebagai hasil dari hambatan yang diciptakan oleh lingkungan dan struktur sosial. Model hak asasi manusia menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses kehidupan yang bermartabat, sementara model psikoemosional menyoroti dampak psikologis dari diskriminasi dan stigma. Dalam konteks pembangunan ruang kota yang inklusif, pendekatan model sosial menjadi penting karena menekankan perlunya perubahan desain ruang, kebijakan,

dan cara pandang masyarakat agar hambatan terhadap penyandang disabilitas dapat dihapuskan. Ketidakmampuan sering kali dianggap berasal sepenuhnya dari tubuh individu, padahal pemahaman ini dibentuk oleh norma dan struktur sosial yang menentukan standar “normal”. Pendekatan sosial menekankan pentingnya membongkar konstruksi tersebut guna mengurangi ketidakadilan yang dialami penyandang disabilitas. Perubahan cara pandang ini menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

c. *Inklusivitas dalam ruang sosial perkotaan*

Inklusivitas dalam ruang sosial perkotaan menekankan bahwa ruang tidak hanya harus dapat diakses secara fisik, tetapi juga mampu mengakomodasi interaksi sosial yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Ruang sosial yang tidak dirancang secara inklusif dapat memperkuat ketimpangan dan membatasi partisipasi kelompok tertentu, termasuk penyandang disabilitas. Misalnya, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas atau ketidaksesuaian desain ruang bagi kelompok tertentu dapat menghalangi akses mereka untuk terlibat dalam interaksi sosial yang seharusnya terjadi. Maka, desain universal menjadi pendekatan penting dalam menciptakan ruang yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa memerlukan penyesuaian khusus.

Desain universal merupakan sebuah upaya merancang produk maupun lingkungan agar bisa digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin, tanpa perlu diubah atau dibuat khusus untuk kelompok tertentu (Eslami & Mahmoudi, 2016). Terdapat tujuh prinsip yang harus diperhatikan untuk mewujudkan ruang yang terbuka dan dapat digunakan oleh semua orang. Ketujuh prinsip tersebut meliputi penggunaan yang adil (*Equitable Use*), fleksibilitas dalam penggunaan (*Flexibility in Use*), penggunaan yang sederhana dan intuitif (*Simple and Intuitive Use*), informasi yang mudah dipersepsi (*Perceptible Information*), toleransi terhadap kesalahan (*Tolerance for Error*), upaya fisik yang rendah (*Low Physical Effort*), serta ukuran dan ruang yang memadai untuk akses dan penggunaan (*Size and Space for Approach and Use*) menjadi dasar dalam merancang ruang publik yang lebih inklusif (Esfandfard, dkk, 2016).

Selain itu, hak penyandang disabilitas untuk mengakses ruang publik juga telah dijamin melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No.19 Tahun 2011 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016, yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan aksesibilitas yang setara. Akses tersebut harus dijamin baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta mencakup upaya identifikasi dan penghapusan hambatan-hambatan yang

menghalangi partisipasi penyandang disabilitas dalam ruang publik. Ketidakhadiran aksesibilitas menjadi bentuk pengabaian hak, bukan sekedar kekurangan teknis. Sehingga, kebijakan publik harus memastikan adanya standar desain yang merangkul semua kalangan masyarakat.

Selain memiliki fungsi ekologi dan estetika, taman kota juga berfungsi sebagai ruang sosial tempat masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan melakukan berbagai aktivitas (Jamaludin, 2015). Keberadaannya dapat memperkuat solidaritas sosial serta membangun hubungan emosional antara masyarakat dan lingkungan. Taman kota sendiri dapat dibedakan menjadi taman rekreasi aktif, rekreasi pasif, dan kombinasi keduanya, yang masing-masing menyediakan ruang bagi berbagai kebutuhan aktivitas warga. Taman rekreasi aktif dirancang dengan berbagai fasilitas yang mendorong pengunjung untuk melakukan kegiatan fisik secara langsung, sedangkan taman rekreasi pasif lebih mengutamakan ketenangan dan keindahan. Terakhir, taman yang menggabungkan unsur aktif dan pasif secara bersamaan. Taman seperti ini memungkinkan pengunjung untuk berolahraga sekaligus menikmati taman yang asri, atau hanya sekedar bersantai di tengah orang-orang yang berkegiatan lain. Dengan elemen seperti vegetasi, jalur pejalan kaki, area bermain, fasilitas olahraga, serta sarana penunjang lainnya,

taman kota berpotensi menjadi ruang publik yang hidup dan dapat dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat.

Namun, inklusivitas dalam ruang kota tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik. Dalam banyak kasus, desain ruang masih didasarkan pada asumsi bahwa semua pengguna memiliki kemampuan tubuh yang seragam, sehingga kebutuhan penyandang disabilitas sering terabaikan. Inklusivitas seharusnya tidak hanya dipahami sebagai keberadaan fasilitas seperti *ramp* atau toilet aksesibel, tapi juga sebagai upaya memastikan kesetaraan dalam pengalaman, partisipasi, dan rasa memiliki terhadap ruang tersebut. Ruang yang inklusif harus mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk terlibat dalam kehidupan sosial.

Dari perspektif disabilitas, inklusi sosial mencakup akses terhadap lingkungan, layanan, informasi, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan perkotaan secara adil (Rebernik et. al, 2023). Pendekatan sosial terhadap disabilitas menekankan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas sering kali berasal dari struktur sosial dan desain lingkungan yang tidak mempertimbangkan keberagaman pengguna. Oleh sebab itu, mewujudkan ruang kota yang inklusif tidak hanya memerlukan perbaikan desain fisik, tetapi juga perubahan cara pandang

masyarakat serta kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

d. *Teori produksi ruang oleh Lefebvre*

Ruang sosial tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang netral atau sekadar latar bagi aktivitas manusia. Ruang dibentuk oleh relasi sosial sekaligus membentuk relasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemikirannya, Henri Lefebvre menjelaskan ruang melalui tiga dimensi utama, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional (Lefebvre, 2001). Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa ruang tidak hanya hadir sebagai bentuk fisik yang dapat dilihat dan diukur, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang berkaitan dengan aktivitas manusia, kebijakan, serta pengalaman dan makna yang melekat di dalamnya.

Praktik spasial merujuk pada bagaimana ruang digunakan dan dialami dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki tingkat kompetensi dan kemampuan tertentu dalam memahami dan menggunakan ruang tersebut. Artinya, penggunaan ruang sehari-hari tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang terbentuk dalam waktu lama. Pola-pola ini cenderung stabil dan berlangsung terus menerus sehingga membentuk rutinitas bersama.

Representasi ruang berkaitan dengan cara ruang dirancang dan diatur secara formal oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti perencana kota atau institusi melalui kebijakan dan perencanaan. Dalam hal ini, representasi ruang bukan sekedar gambaran visual, tapi juga panduan ideologis dalam mendesain kota atau lingkungan. Representasi ini bersifat normatif karena menentukan bagaimana ruang seharusnya digunakan menurut logika perencanaan, Sementara itu, ruang representasional berkaitan dengan makna simbolik, pengalaman emosional, serta memori kolektif yang muncul dari keterlibatan masyarakat dengan suatu tempat. Ruang ini merepresentasikan pengalaman nyata masyarakat yang tidak selalu tertangkap dalam perencanaan formal. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa ruang merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Dinamika Praktik Spasial Penyandang Disabilitas di Tebet Eco Park*

Taman kota merupakan bagian dari ruang sosial yang tidak hanya terdiri dari elemen fisik seperti pepohonan atau fasilitas publik, tetapi juga menjadi wadah terjadinya interaksi sosial. Dalam penelitian ini, taman kota dipahami melalui perspektif produksi ruang Lefebvre, yang menjelaskan bahwa

ruang dibentuk melalui tiga dimensi, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional. Melalui pendekatan ini, taman tidak hanya dilihat sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai hasil dari aktivitas, kebiasaan sosial, serta relasi kekuasaan yang berkembang di dalamnya.

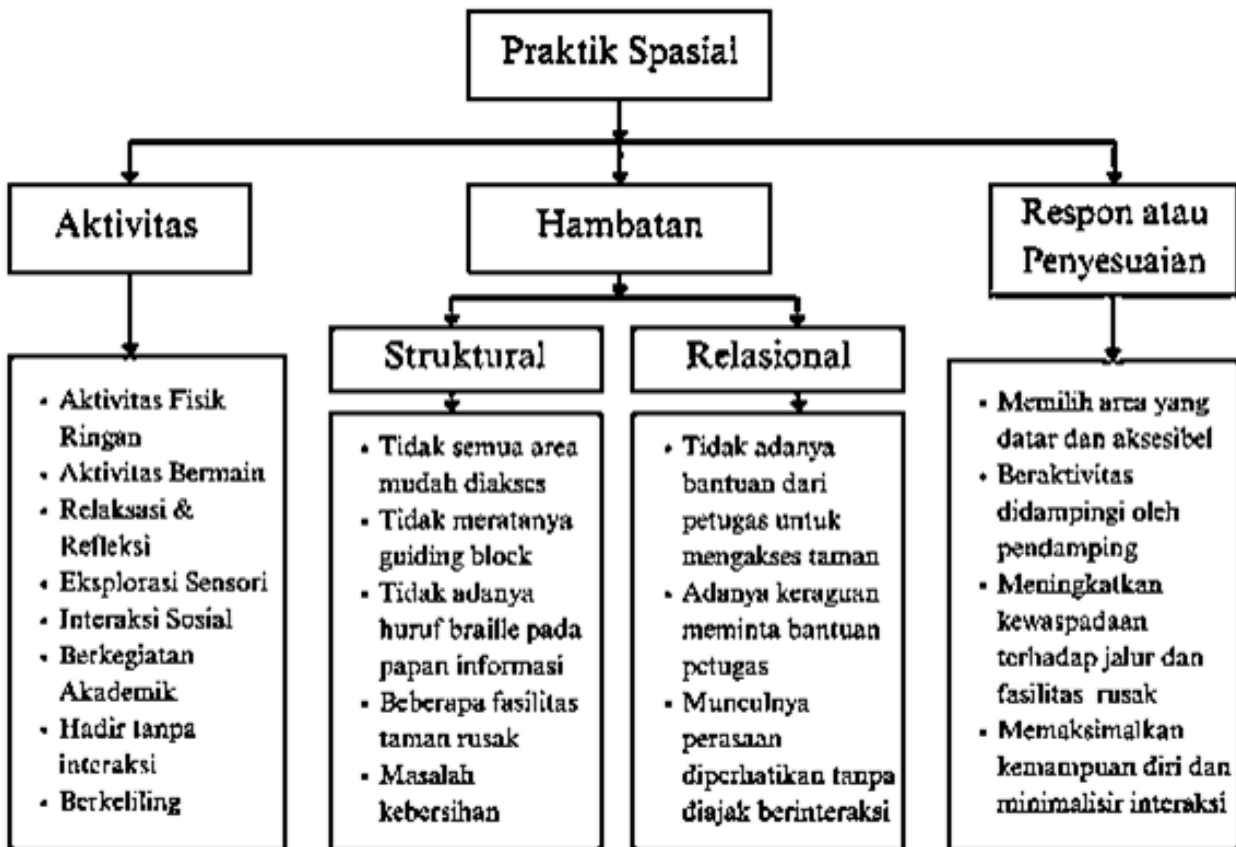
Praktik spasial merujuk pada cara ruang digunakan dan diproduksi melalui aktivitas sehari-hari yang berulang. Pola penggunaan ruang ini membentuk kebiasaan kolektif yang sering kali dianggap sebagai hal yang normal oleh masyarakat. Sebelum revitalisasi, praktik sosial di Tebet Eco Park didominasi oleh aktivitas olahraga, sehingga taman lebih dipahami sebagai ruang untuk berlari atau beraktivitas fisik. Kondisi tersebut membuat fungsi taman sebagai ruang sosial menjadi terbatas karena lebih mengakomodasi kelompok pengguna tertentu yang mengikuti pola penggunaan dominan tersebut.

Setelah revitalisasi, Tebet Eco Park mengalami perubahan orientasi dengan konsep “*Connecting people with nature*” yang bertujuan menghubungkan manusia dengan alam sekaligus memperluas fungsi sosial taman. Penataan ulang ini menghadirkan berbagai elemen yang memungkinkan aktivitas yang lebih beragam, seperti rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial. Meskipun demikian, pengalaman pengunjung dalam memanfaatkan ruang tetap dipengaruhi oleh

kondisi fisik, aksesibilitas fasilitas, serta pengalaman individu. Dalam penelitian ini, sebagian informan penyandang disabilitas memanfaatkan taman melalui aktivitas

ringan, eksplorasi, atau permainan, sementara yang lain memilih beraktivitas secara terbatas sesuai kenyamanan mereka.

Gambar 1. Aktivitas, Hambatan, dan Respon Penyandang Disabilitas dalam Praktik Spasial di Tebet Eco Park



(Sumber: Analisis Penulis, 2025.)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman penyandang disabilitas di Tebet Eco Park masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun relasional. Hambatan struktural meliputi keterbatasan akses fisik, kerusakan fasilitas, atau kurangnya informasi aksesibel, sedangkan hambatan relasional berkaitan dengan interaksi yang pasif dengan pengunjung lain maupun petugas taman. Meskipun demikian, penyandang

disabilitas tetap melakukan berbagai bentuk penyesuaian untuk dapat memanfaatkan ruang taman, baik melalui adaptasi fisik maupun sosial. Penyesuaian ini menjadi strategi adaptif yang memperlihatkan bagaimana mereka menavigasi keterbatasan dan membentuk makna atas ruang yang mereka gunakan. Bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan penyandang disabilitas terhadap fasilitas dan interaksi sosial di taman memperlihatkan cara mereka

membangun pengalaman ruangnya masing-masing.

Dalam perspektif Lefebvre, hubungan antara aktivitas, hambatan, dan penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa praktik spasial penyandang disabilitas merupakan hasil interaksi antara desain ruang, kondisi sosial, dan relasi kekuasaan yang ada di dalamnya. Hal ini menegaskan bahwa taman kota tidak sepenuhnya netral, karena masih terdapat konstruksi sosial yang memprioritaskan kelompok tertentu. Dengan demikian, mewujudkan ruang yang inklusif tidak hanya memerlukan penyediaan fasilitas fisik, tapi juga perubahan cara pandang sosial agar semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara dalam ruang kota.

b. Kesenjangan antara Representasi dan Realitas Ruang di Tebet Eco Park

Representasi ruang dalam teori produksi ruang Lefebvre merujuk pada bagaimana ruang dikonseptualisasikan melalui perencanaan, kebijakan, dan narasi institusional. Representasi ini lahir dari relasi produksi dan kekuasaan yang dominan, dan umumnya dikuatkan melalui simbol dan sistem pengetahuan yang dianggap sah. Representasi ini tidak hanya menentukan bagaimana ruang dibangun, tetapi juga membentuk cara ruang dipahami oleh masyarakat. Dalam praktiknya, representasi ruang sering terlihat rasional

dan ideal, tetapi sebenarnya mengandung nilai ideologis dan kepentingan tertentu yang memengaruhi siapa yang diprioritaskan dalam desain ruang kota.

Dalam konteks revitalisasi taman Tebet Eco Park, representasi ruang dapat dilihat dari pernyataan Gubernur yang tengah menjabat saat itu, Anies Baswedan, yang menekankan bahwa taman harus menjadi ruang hidup yang mendorong interaksi sosial dan ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak. Namun, pada tingkat perencanaan teknis, fokus awal revitalisasi lebih diarahkan pada perbaikan lanskap dan kenyamanan lingkungan secara umum (Wawancara Informan H, 2025). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara visi kebijakan yang menekankan inklusivitas sosial dan implementasi teknis yang lebih berorientasi pada aspek fisik ruang.

Ketidaksinkronan tersebut berdampak pada pengalaman pengguna taman, terutama penyandang disabilitas. Representasi ruang yang diproduksi oleh pemerintah cenderung bersifat normatif dan idealistik, sementara praktik spasial penyandang disabilitas menunjukkan bagaimana ruang tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan aktual pengguna. Lefebvre menekankan bahwa ketika representasi tidak merefleksikan keragaman pengalaman sosial, maka ruang yang dihasilkan hanya

menjadi bentuk abstraksi yang menyingkirkan tubuh-tubuh yang tidak sesuai dengan norma dominan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi pembangunan yang tampak inklusif dengan realitas di lapangan, di mana penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun relasional dalam mengakses ruang.

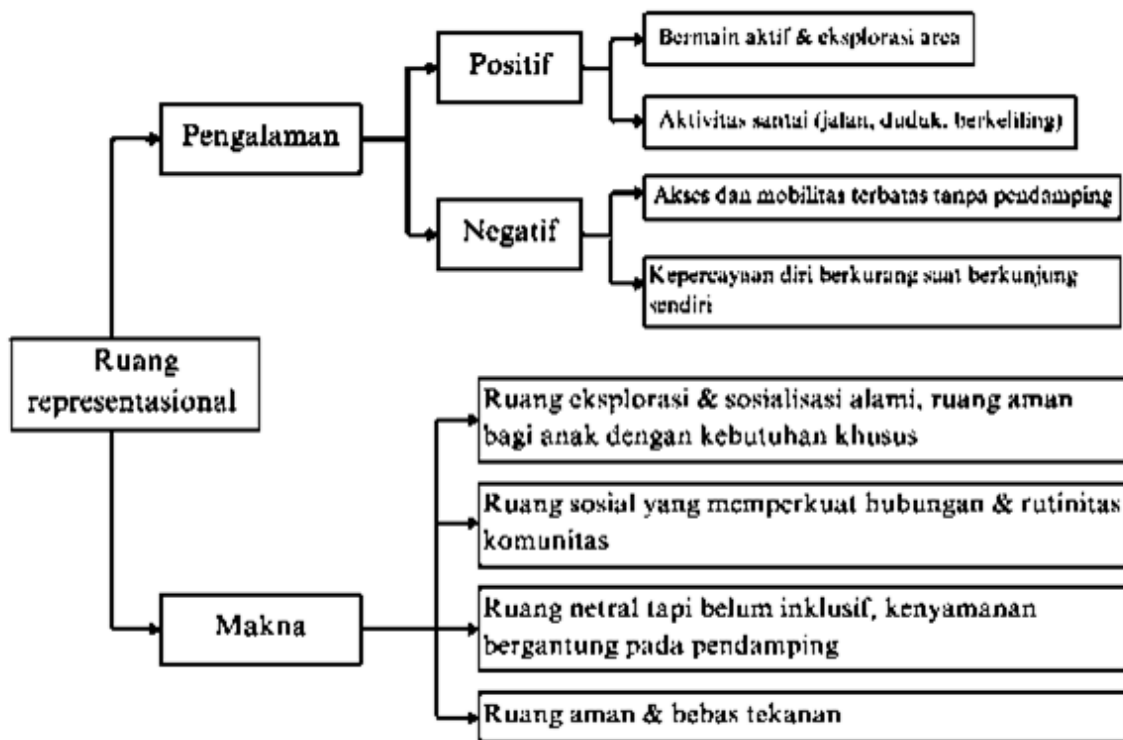
Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun hak penyandang disabilitas atas ruang publik telah dijamin melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penerapannya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik perencanaan dan pengelolaan ruang kota. Dalam perspektif Lefebvre, kesenjangan antara representasi ruang dan pengalaman nyata pengguna menunjukkan bahwa ruang di perkotaan masih diproduksi melalui relasi kekuasaan tertentu, sehingga tidak semua kelompok

masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan merasakan ruang secara setara.

c. Ruang Representasional Penyandang Disabilitas di Tebet Eco Park

Ruang representasional dalam teori produksi ruang yang dikemukakan oleh Lefebvre merujuk pada dimensi ruang yang sarat dengan makna simbolik, emosi, dan pengalaman yang dirasakan secara personal maupun kolektif (Lefebvre, 1991). Ruang ini tidak terbentuk melalui kebijakan atau rancangan teknis semata, tetapi melalui pengalaman sehari-hari pengguna yang melibatkan tubuh, memori, dan interaksi sosial. Secara garis besar, ruang menjadi tempat di mana identitas, kenyamanan, serta makna sosial terbentuk dan diinternalisasi melalui pengalaman langsung penggunanya.

Gambar 2. Pengalaman dan Makna Penyandang Disabilitas dalam Memanfaatkan Tebet Eco Park



(Sumber: Analisis Penulis, 2025.)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman penyandang disabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik taman, tapi juga oleh rasa aman, dukungan sosial, dan kenyamanan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sebagian informan menggambarkan pengalaman positif seperti bermain, berjalan santai, atau menjelajahi taman, yang memberikan kesempatan untuk relaksasi dan interaksi sosial. Namun, terdapat pula pengalaman negatif, terutama ketika mobilitas menjadi terbatas karena tidak adanya pendamping.

Makna ruang yang terbentuk dari pengalaman tersebut juga beragam. Bagi beberapa informan, taman menjadi ruang eksplorasi dan sosialisasi yang aman serta

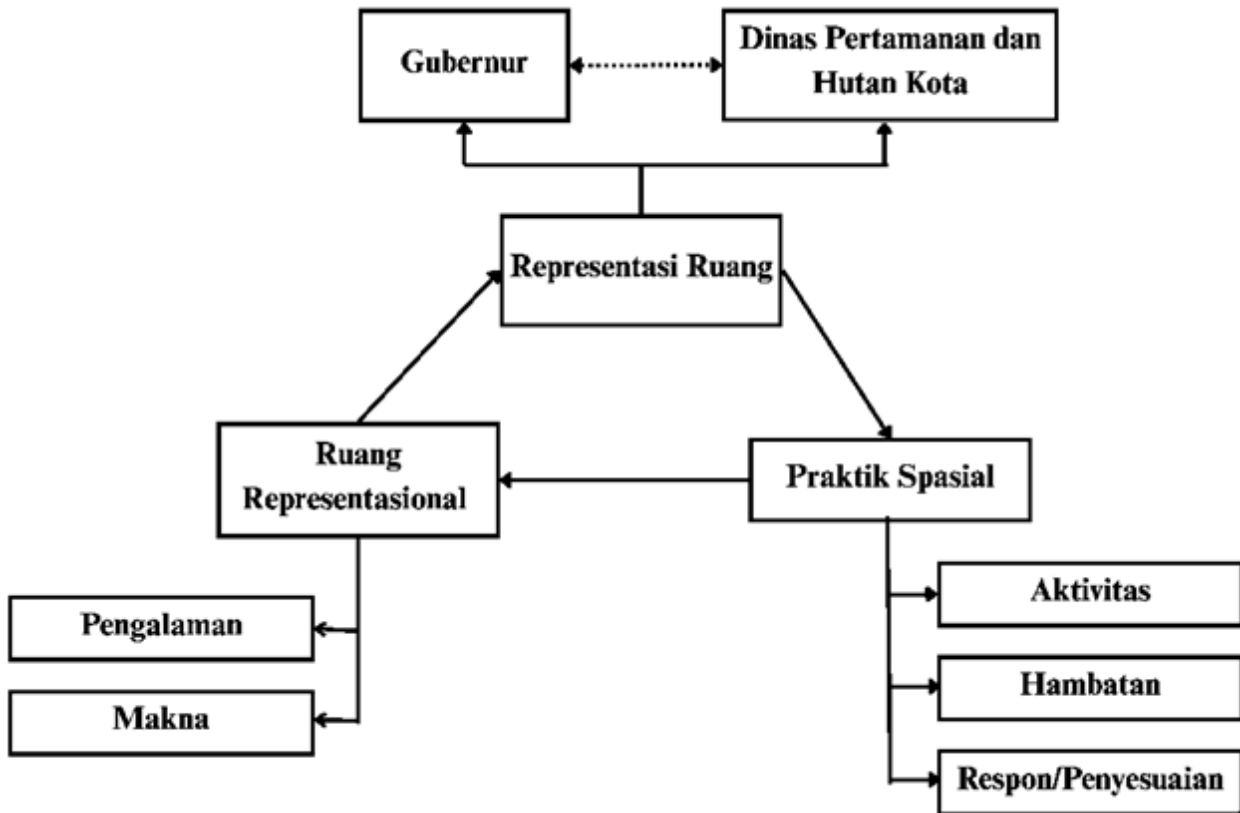
mendukung aktivitas komunitas. Namun bagi yang lain, taman masih dipandang sebagai ruang yang belum sepenuhnya inklusif karena kenyamanan penggunaan sangat bergantung pada keberadaan pendamping. Meski demikian, taman tetap dimaknai sebagai ruang yang relatif aman dan memberikan kesempatan bagi individu untuk beristirahat dari tekanan kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang representasional di Tebet Eco Park belum sepenuhnya mencerminkan nilai inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga mengindikasikan bahwa permasalahan representasi ruang yang belum sepenuhnya inklusif tidak semata-mata persoalan teknis

desain atau penyediaan fasilitas, melainkan cerminan dari tatanan sosial dan budaya.

Semua hal tersebut saling berkaitan dan terus mempengaruhi satu sama lain.

Gambar 3. Relasi Representasi Ruang dan Praktik Spasial Penyandang Disabilitas



(Sumber: Analisis Penulis, 2025.)

Hubungan antara kebijakan, desain ruang, praktik penggunaan, serta pengalaman pengguna menunjukkan bahwa produksi ruang merupakan proses yang saling memengaruhi. Representasi ruang yang terbentuk melalui kebijakan dan perencanaan memengaruhi bagaimana ruang digunakan, sementara pengalaman pengguna kemudian membentuk makna simbolik atas ruang tersebut. Keterhubungan ini menegaskan bahwa inklusivitas tidak bisa diwujudkan hanya dengan membenahi

satu poin saja. Perubahan desain tanpa transformasi kebijakan akan menghasilkan ruang yang aksesibel secara fisik, tapi tetap mengekalkan hambatan sosial. Demikian pula dengan program inklusi tanpa pembaruan desain fisik akan tetap meninggalkan celah yang membatasi kemandirian. Oleh karena itu, mewujudkan ruang kota yang inklusif tidak cukup hanya melalui perbaikan desain fisik, tapi juga memerlukan perubahan kebijakan dan cara pandang agar penyandang disabilitas benar-

benar diakui sebagai subjek yang setara dalam ruang perkotaan.

d. Tebet Eco Park dan Realitas Ruang Sosial Inklusif bagi Pengunjung Disabilitas

Tebet Eco Park menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik tidak secara otomatis menciptakan ruang sosial yang inklusif. Meskipun taman ini menjadi tempat berkumpul, beraktivitas fisik, dan bersantai, interaksi sosial lintas kelompok masih relatif terbatas. Pengunjung penyandang disabilitas cenderung beraktivitas bersama pendamping atau keluarganya dan jarang berinteraksi dengan pengunjung lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi sosial taman masih lebih banyak dimanfaatkan secara individual atau dalam kelompok kecil.

Dari perspektif ruang sosial, taman seharusnya menjadi tempat terbentuknya relasi sosial secara lebih terbuka. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya hambatan kultural dan struktural yang memengaruhi interaksi tersebut. Beberapa informan cenderung menghindari interaksi karena perbedaan cara komunikasi, sementara informan lainnya merasa kurang nyaman akibat keterbatasan fasilitas aksesibilitas seperti *guiding block* dan papan informasi yang tidak dilengkapi dengan huruf braille. Hambatan fisik ini kemudian berpengaruh pada hambatan sosial, karena keterbatasan mobilitas dan akses informasi dapat mengurangi rasa percaya diri untuk

berinteraksi di taman Tebet Eco Park.

Selain itu, sebagian informan juga pernah merasakan pengalaman kurang nyaman ketika menjadi pusat perhatian atau merasa fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas tidak hanya berkaitan dengan aksesibilitas fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan kultural yang memengaruhi rasa diterima di ruang publik. Meskipun terdapat interaksi positif seperti bantuan dari pendamping atau petugas taman, dukungan tersebut masih bersifat insidental dan belum didukung oleh mekanisme yang terstruktur dari pengelola taman.

Fungsi sosial taman juga belum optimal karena tidak adanya program atau kegiatan yang secara khusus melibatkan penyandang disabilitas sebagai partisipan aktif. Ketiadaan kegiatan seperti *workshop* atau aktivitas bersama secara rutin pun ikut membatasi peluang terjadinya interaksi antara penyandang disabilitas dan pengunjung umum. Akibatnya, taman lebih berfungsi sebagai ruang fisik yang menyediakan fasilitas rekreasi, tetapi belum sepenuhnya berkembang sebagai ruang sosial yang inklusif.

Dalam kerangka teori produksi ruang dari Lefebvre, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi ruang, praktik spasial, dan pengalaman pengguna. Inklusivitas taman Tebet Eco

Park tidak hanya ditentukan oleh desain atau kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana ruang tersebut digunakan serta dimaknai oleh pengunjung. Tingkat inklusivitas di Tebet Eco Park akan meningkat apabila hambatan fisik dapat diminimalkan dan dukungan sosial, seperti program yang melibatkan penyandang disabilitas, hadir secara efektif. Oleh karena itu, pengembangan taman kota perlu mempertimbangkan dimensi fisik, sosial, dan simbolik secara bersamaan agar ruang publik dapat benar-benar mendorong partisipasi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Tebet Eco Park dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas taman kota dan menyediakan ruang hijau yang lebih tertata bagi masyarakat. Namun, penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas tidak menjadi fokus utama dalam tahap perencanaan. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan antara narasi inklusivitas yang disampaikan oleh Anies Baswedan dengan prioritas teknis dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang lebih menekankan aspek estetika, penataan lanskap, dan kenyamanan visual, sehingga aksesibilitas bagi disabilitas hanya hadir sebagai pelengkap.

Dalam pemanfaatannya, penyandang disabilitas tetap menggunakan Tebet Eco Park sebagai ruang rekreasi dan interaksi sosial,

tetapi masih menghadapi berbagai hambatan fisik dan sosial. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain guiding block yang tidak merata, tidak adanya huruf braille pada papan informasi, serta keterbatasan dukungan dari lingkungan sekitar yang membuat pengguna masih bergantung pada pendamping. Kondisi ini menunjukkan bahwa Tebet Eco Park belum sepenuhnya menjadi ruang sosial yang inklusif, karena implementasi fasilitas aksesibel masih parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga pengembangan taman kota perlu lebih memperhatikan pengalaman dan kebutuhan kelompok rentan agar tercipta ruang yang benar-benar setara bagi semua pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguiar-Carrasco, M. J., Gielen, E., Vallés-Planells, M., Galiana, F., & Riutort-Mayol, G. (2023). Assessment of barriers for people with disability to enjoy national parks. *Frontiers in psychology*, Vol 13.
- Agustina, M. (2021). Evaluasi Kualitas Ruang Terbuka Publik Menggunakan Good Public Space Index Di Kota Palembang. *Jurnal Desiminasi Teknologi*, Vol 9, No 2.
- Anderson, J., & Supatra, S. (2023). Ruang Terapi Seni Bagi Penyandang Disabilitas Tunadaksa. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 5(2), 585-596.
- Błaszczuk, M., Suchocka, M., Wojnowska-Heciak, M., & Muszyńska, M. (2020).

- Quality of urban parks in the perception of city residents with mobility difficulties. *PeerJ*.
- Brown, R. L., Maroto, M., & Pettinicchio, D. (Eds.). (2023). *The Oxford handbook of the sociology of disability*. New York: Oxford University Press.
- Carmona, M. (2021). *Public places urban spaces: The dimensions of urban design*. New York: Routledge.
- Cassarino, M., Shahab, S., & Biscaya, S. (2021). Envisioning happy places for all: A systematic review of the impact of transformations in the urban environment on the wellbeing of vulnerable groups. *Sustainability*, Vol 13, No 14.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Esfandfard, E., Wahab, M. H., & Amat, R. C. (2018). Universal Design in urban public spaces for people with disability. Case study of Tehran, Iran. *Planning Malaysia*, Vol 16.
- Eslami, L., & Mahmoudi, M. M. (2016). Universal design and social sustainability in the city: The case study of Tehran Iran. In *Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future* (pp. 263-273). IOS Press.
- Fernando, D. L., Galpaya, H., Hurulle, G., & Mobley, C. (2022). Disability and Place of Living: Experiences of Disability, Accessibility, and Inequality in Four Regions of Myanmar. *Accessibility, and Inequality in Four Regions of Myanmar*, Vol 42, No 1.
- Gunawan, I. G. N. A., Murtionoama, H., & Suwarlan, S. A. (2022). Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Persepsi Pengguna (Studi Kasus: Taman Laman Boenda). *Sigma Teknika*, Vol 5, No 1.
- Hidayat, H. N., Almos, R., & Lintang Sari, A. P. (2023). Aksesibilitas Dan Inklusivitas Orang Tuli Di Ruang Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 14, No 4.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jeon, Y., Kim, Y. S., Kim, G. Y., & Yeon, P. S. (2024). Effects of Urban Forest Therapy on Depression, Anxiety, and Sleep Quality in People Experiencing Cancer. *Journal of People, Plants, and Environment*, 27(4), 303-317.
- Landman, K. (2020). Inclusive public space: Rethinking practices of mitigation, adaptation and transformation. *Urban Design International*, Vol 25.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Oxford: Blackwell Publishers.
- Lepoglavec, K., Papeš, O., Lovrić, V., Raspudić, A., & Nevečerel, H. (2023). Accessibility of Urban Forests and Parks for People with Disabilities in Wheelchairs, Considering the Surface and Longitudinal Slope of the Trails.

- Sustainability*. Vol 15, No 10.
- Madanipour, A. (2003). *Public and private spaces of the city*. London: Routledge.
- Perry, M., Cotes, L., Horton, B., Kunac, R., Snell, I., Taylor, B., ... & Devan, H. (2021). "Enticing" but not necessarily a "space designed for me": experiences of urban park use by older adults with disability. *International journal of environmental research and public health*, Vol 18, No 2.
- Poldma, T., Labbé, D., Bertin, S., De Grosbois, È., Barile, M., Mazurik, K., & Artis, G. (2014). Understanding people's needs in a commercial public space: About accessibility and lived experience in social settings. *Alter*, Vol 8, No 3.
- Purnomohadi, N. (2006). *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jendral Penataan Ruang.
- Rahardjo, F. E. K., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2023). Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki bagi Disabilitas pada Taman Kota Aktif di Semarang. *Tesa Arsitektur*, Vol 21, No 1.
- Rebernik, N., Szajczyk, M., Bahillo, A., & Goličnik Marušić, B. (2020). Measuring disability inclusion performance in cities using disability inclusion evaluation tool (DIETool). *Sustainability*, 12(4), 1378.
- Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). *Memantau pemenuhan hak-hak disabilitas*. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Sary, R. K. (2018). Evaluasi Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang. *Jurnal Arsitektur Arsir*, Vol 2, No 1.
- Selanon, P., Puggioni, F., Dejnirattisai, S., & Rutchamart, A. (2022). Towards inclusive and accessible parks in Pathum Thani Province, Thailand. *City, Territory and Architecture*, Vol 9, No 1.
- Selanon, P., Puggioni, F., Dejnirattisai, S., Sapsangthong, A., & Rutchamart, A. (2022). Building a Suitability Scoring System for the Redevelopment of an Existing Park into an Inclusive Park for Disabled: Case Studies from Pathum Thani, Thailand. *Thammasat Review*, Vol 25, No 2.
- Umar, F., Nur, K. W., Paddiyatu, N., & Amalia, A. A. (2021). Persepsi Difabel Penglihatan Terhadap Arsitektur Kota (Studi Kasus Kota Makassar), *Jurnal Arsitektur Zonasi*, Vol 4, No 1.
- Wojnowska-Heciak, M., Suchocka, M., Błaszczak, M., & Muszyńska, M. (2022). Urban parks as perceived by city residents with mobility difficulties: a qualitative study with in-depth interviews. *International journal of environmental research and public health*, Vol 19, No 4.